

ANALISIS PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Irmansyah¹, Audrey Azzahra², Tasya Fitri Fery³, Raden Ai Lutfi Hidayat⁴

Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

E-mail : *syahirman541@gmail.com¹, azzahraaudrey06@gmail.com², tasyaauliaff@gmail.com³,
dosen02243@unpam.ac.id⁴

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pembangunan ekonomi Indonesia. Terlepas dari tren pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, distribusi pendapatan tetap tidak seimbang, seperti yang ditunjukkan oleh nilai rasio Gini yang tetap tinggi. Dengan menggunakan studi literatur kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, terutama pajak progresif, belanja sosial, dan investasi publik di sektor-sektor strategis, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesetaraan distribusi pendapatan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal masih terhambat oleh tantangan seperti ketidakpatuhan pajak, keterbatasan data, dan lemahnya transparansi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan reformasi fiskal yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata kelola publik agar kebijakan fiskal dapat berperan optimal dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci

Kebijakan Fiskal, ketimpangan Pendapatan, Indonesia

ABSTRACT

Income inequality is one of the main problems faced by Indonesia's economic development. Despite the positive trend of national economic growth, income distribution remains unbalanced, as indicated by the high Gini ratio. Using a qualitative literature study, this study aims to evaluate the role of fiscal policy in reducing income inequality. The results show that fiscal policy, especially progressive taxation, social spending, and public investment in strategic sectors, have great potential to improve equality in income distribution. However, the effectiveness of fiscal policy is still hampered by challenges such as tax non-compliance, limited data, and weak budget transparency. Therefore, sustainable fiscal reform and improvement of the quality of public governance are needed so that fiscal policy can play an optimal role in creating economic equality and supporting sustainable development goals in Indonesia.

Keywords

Fiscal Policy, Income Inequality, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah berkurangnya kesenjangan intra dan antar negara (Bappenas, 2024). Koefisien gini sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan menghitung ketimpangan atau distribusi pendapatan di suatu wilayah. Distribusi pendapatan dikatakan merata jika angka koefisien gini mendekati nol Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang fokus dalam menjalankan Pembangunan ekonomi berkelanjutan menghadapi tantangan yang signifikan terkait ketimpangan pendapatan.

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi angka ketimpangan pendapatan masih saja berfluktuasi perubahannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu ketidakmerataan pendapatan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang

baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana yang disusun oleh pemerintah untuk mengelola pemasukan (dari pajak) dan pengeluaran, yang dapat berdampak pada tingkat pendapatan nasional, lapangan kerja, investasi domestik, dan distribusi pendapatan. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan fiskal merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai “stabilitas atau pembangunan”.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu kompleks dan multidimensional yang terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan disparitas dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di antara penduduk, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (World Bank, 2021). Di Indonesia, meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, isu ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan serius. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah masih lebar, dengan implikasi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

Sebagai ilustrasi, di beberapa negara yang sedang berkembang, penerapan sistem pajak progresif berjalan dengan baik, namun kelemahan dalam administrasi pajak menyebabkan adanya kelangkaan dana pajak. Kemampuan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan secara efektif berkurang dalam situasi seperti ini. Studi oleh Nusiantari dan Swasito (2020) menemukan bahwa korupsi pemerintahan pajak dan sistem perpajakan yang tidak efisien menyebabkan ketidaksetaraan, meskipun penerimaan pajak telah meningkat di berbagai negara. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pembagian pengeluaran sosial menyebabkan ketidaksetaraan, di mana sebagian besar pengeluaran publik dialokasikan untuk kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekayaan yang lebih besar.

Meskipun begitu, Berbagai faktor sering menghambat kemampuan kebijakan fiskal untuk mengatasi ketimpangan di negara-negara berkembang. Kualitas administrasi pajak dan pengeluaran pemerintah merupakan hambatan utama. Studi menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi masalah dengan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran; hal ini menyebabkan kebijakan fiskal tidak efektif untuk mencapai tujuan redistribusi. Contohnya, tingkat korupsi yang tinggi dan kegagalan manajemen belanja publik sering menyebabkan kebocoran anggaran yang signifikan. Akibatnya, masyarakat yang kurang mampu tidak sepenuhnya menikmati keuntungan dari pengeluaran sosial (Kristanto, 2023; Widiarti & Subekti, 2022). Akibatnya, meskipun kebijakan pajak progresif diterapkan, ketimpangan masih besar.

Tabel 1. Data Statistik

Tahun	Gini Ratio	Tax Ratio (%)	Belanja Sosial (Rp Triliun)
2023	0,388	10,4%	476,0
2024	0,384	10,6%	491,5
2025	0,380	11,2%	505,0

Berdasarkan data statistik di atas, terlihat bahwa Gini Ratio, yang merefleksikan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia, menunjukkan tren menurun dari 0,388 pada tahun 2023 menjadi 0,384 di tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 0,380 pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), penurunan Gini Ratio ini

berkorelasi positif dengan peningkatan belanja perlindungan sosial dan subsidi pemerintah.

Di sisi lain, Tax Ratio yakni rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 10,4% pada tahun 2023 menjadi 11,2% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan penguatan kapasitas fiskal negara dalam menyediakan layanan publik dan program redistribusi, sebagai dampak dari reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak. Menurut Kementerian Keuangan RI (2024), peningkatan ini juga didorong oleh digitalisasi sistem perpajakan dan optimalisasi pungutan pajak dari sektor digital dan UMKM.

Sementara itu, belanja sosial mengalami tren peningkatan dari Rp 476 triliun pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp 505 triliun pada tahun 2025. Belanja ini mencakup program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan subsidi energi, yang berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial RI (2023) dan Bappenas (2024), intervensi fiskal melalui belanja sosial terbukti berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal dan kawasan urban miskin.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal muncul sebagai instrumen krusial yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi dan bahkan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Kebijakan fiskal, yang mencakup pengaturan penerimaan negara (pajak, bea masuk, retribusi, dll.) dan pengeluaran pemerintah (belanja publik, subsidi, program sosial, transfer ke daerah, dll.), dirancang untuk mencapai berbagai tujuan makroekonomi, termasuk stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya yang efisien, dan redistribusi pendapatan (IMF, 2020). Secara teoritis, instrumen-instrumen fiskal seperti pajak progresif (pajak penghasilan, pajak kekayaan), transfer tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), subsidi pendidikan dan kesehatan, serta investasi pada infrastruktur publik dapat berperan sebagai mekanisme redistributif yang efektif (Dartanto, 2016; Komalasari, 2018).

Penelitian ini, yang didukung oleh Heliany, I. (2021), menemukan bahwa tujuan kebijakan fiskal untuk pembangunan demokrasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, laju investasi, dan pendapatan nasional. Selain itu, kebijakan fiskal berfungsi untuk membantu mengatasi resesi ekonomi Indonesia.

Menurut Mujasmara et al. (2023) penelitian, tujuan kebijakan fiskal untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, stabilitas perekonomian, peningkatan laju investasi, dan peningkatan distribusi pendapatan nasional.

Hardinandar, F. (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan pengalihan dana memperbesar hasil ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan di wilayah pedesaan. Namun, pendapatan dari pajak memperburuk ketidakadilan di area perkotaan dan juga mengurangi angka kemiskinan di daerah pedesaan. Selanjutnya, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah meningkatkan kemiskinan di pedesaan, sedangkan kontribusi dana alokasi umum mengurangi kemiskinan di kawasan perkotaan. Setelah sepuluh periode, peningkatan output baru dapat mencapai lima puluh perse n. Di sisi lain, perubahan ketimpangan jangka panjang jauh lebih cepat daripada penurunan kemiskinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam menangani ketimpangan pendapatan di

Indonesia. Studi ini memanfaatkan tinjauan pustaka yang mencakup artikel, dokumen, media, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Menurut wahyuni (2022) Metode tinjauan pustaka adalah kegiatan yang menitikberatkan pada analisis kritis terhadap suatu topik tertentu yang menarik untuk diteliti. Kajian pustaka meliputi aktivitas membaca, memperhatikan, memahami, dan menguraikan hingga melakukan analisis terhadap materi bacaan (teks atau pustaka). Kajian pustaka lebih dari sekadar membaca dan mencatat buku atau literatur, seperti yang banyak orang pikirkan. Ini adalah serangkaian tindakan yang membaca, mencatat, mengumpulkan data, dan mengolah bahan untuk penelitian. Sasaran dari kajian pustaka adalah untuk menelaah (melakukan analisis), memahami, dan mendiskusikan rencana penelitian secara teoritis, konseptual, serta menemukan berbagai variabel penelitian dan keterkaitannya, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya (Zed, 2020).

Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti publikasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BPS, serta World Bank. Sugiyono (2020) menekankan pentingnya data sekunder dalam studi kualitatif untuk memahami pola hubungan sosial-ekonomi secara mendalam. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yakni dengan mengidentifikasi tema utama dari dokumen yang dikaji, seperti kebijakan pajak, belanja sosial, dan subsidi. Krippendorff (2022) menyatakan bahwa content analysis cocok digunakan dalam kajian pustaka untuk menemukan makna tersembunyi dari teks. Selain itu, dilakukan pula analisis komparatif terhadap hasil studi sebelumnya. Yusuf dan Firdaus (2021) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan fiskal secara dinamis, terutama dalam menghadapi krisis seperti pandemi. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan reflektif mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Adiyanta, F. S. (2020), ada dua kategori kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi makro: kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghindari resesi, sedangkan yang kedua berusaha menangani inflasi yang tinggi. Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk menurunkan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pendapatan dari pajak dalam situasi ekonomi yang terlalu aktif karena peningkatan daya beli masyarakat. Tujuan kebijakan kontraktif ini adalah untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan barang serta jasa yang menjadi dasar perekonomian. Sementara itu, ketika ekonomi menjadi tidak stabil, kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan dari pajak. Menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan nasional adalah tujuan dari kebijakan ekspansi ini.

Kebijakan fiskal merupakan seperangkat tindakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi makro tertentu. Instrumen utamanya meliputi pajak (pajak langsung dan tidak langsung), pengeluaran pemerintah (belanja pemerintah dan transfer pembayaran), serta pinjaman pemerintah (utang negara). Tujuan kebijakan fiskal bisa beragam, seperti merangsang pertumbuhan ekonomi (dengan menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran), mengendalikan inflasi (dengan menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran), atau mengurangi pengangguran (dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah). Efektivitas kebijakan fiskal bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi saat ini, struktur

ekonomi negara, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara efisien dan transparan. Salah satu cara untuk mengontrol keseimbangan makroekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat ekonomi dalam jangka pendek. Perubahan makroekonomi di Indonesia tentunya akan berdampak pada perekonomian nasional dan juga industri secara keseluruhan (Wibowo & Khoirudin, 2022).

Selain itu, dalam jangka panjang, kebijakan fiskal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan berkontribusi pada stabilitas makro ekonomi. Keynes berargumen bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Sebelum pandangan Keynes muncul, banyak yang percaya bahwa tindakan keuangan pemerintah tidak memberikan dampak berarti pada tingkat lapangan kerja dan permintaan keseluruhan. Pada masa itu, peran pemerintah dianggap sebatas mendistribusikan kembali dana dari sektor swasta ke pemerintah. Pendapat ini diperkuat oleh hukum yang menyatakan bahwa dalam situasi di mana tenaga kerja sepenuhnya terpakai, setiap peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan pengurangan pengeluaran swasta (*crowding out*) dengan jumlah yang setara, sehingga menghasilkan total pendapatan keseluruhan yang tidak berubah. Namun, Keynes dan ekonom lain yang menekankan pengaruh pengeluaran dan pajak pemerintah pada makroekonomi mengubah perspektif ini. Keynes mencatat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya membawa sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah, tetapi juga menunjukkan efek pengganda. Penguatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut, dan pengeluaran pemerintah yang berasal dari kebijakan anggaran seharusnya baik untuk masyarakat atau membantu mengurangi kemiskinan (Khoirudin dan Khasanah, 2018).

Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata dalam suatu masyarakat, di mana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas hanya memiliki sedikit. Faktor-faktor penyebabnya kompleks dan saling berkaitan, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, akses pendidikan yang tidak merata, diskriminasi, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, dan struktur ekonomi yang tidak adil. Dampaknya pun luas, mulai dari peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial hingga pertumbuhan ekonomi yang lambat dan masalah kesehatan masyarakat. Mengatasi ketimpangan membutuhkan pendekatan multi-faceted, seperti investasi dalam pendidikan, kebijakan pajak progresif, perlindungan sosial yang kuat, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal. Menurut Sugiarti (2023) Ketidaksetaraan pendapatan merupakan sebuah gagasan yang menggambarkan variasi dalam kekayaan, kualitas hidup, serta uang yang diterima atau dihasilkan oleh orang atau keluarga di dalam suatu komunitas. Hal ini menyebabkan distribusi yang tidak seimbang di antara berbagai daerah, yang disebabkan oleh perbedaan dalam faktor produksi dan sumber daya yang ada. Ketidaksetaraan pendapatan umumnya lebih tinggi di negara-negara yang sedang dalam tahap awal pembangunan, sementara di negara-negara maju atau dengan pendapatan yang lebih tinggi, distribusinya cenderung lebih merata atau memiliki tingkat ketidaksetaraan yang lebih rendah.

Jadi bahwa Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kebijakan ini mencakup berbagai bentuk, antara lain kebijakan pajak, belanja sosial, subsidi, dan program pembangunan inklusif yang dirancang untuk mengarahkan sumber daya kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan hasil studi pustaka dari berbagai sumber, peran

kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama:

a. Peran Redistributif Pajak dan Subsidi

Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah fungsi distribusi. Menurut Arifin (2021), sistem perpajakan yang progresif memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan. Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan yang disusun secara progresif serta program subsidi yang tepat sasaran, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan energi, mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Namun, efektivitas kebijakan pajak dalam menurunkan ketimpangan di Indonesia masih terbatas. Studi oleh Nugroho dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap redistribusi pendapatan masih rendah, terutama karena tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak, maraknya penghindaran pajak, serta basis pajak yang sempit. Akibatnya, dampak redistributif pajak belum optimal.

b. Belanja Sosial dan Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial yang didanai oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (2023), program-program ini berkontribusi signifikan terhadap penurunan rasio Gini dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Wibowo dan Yuliana (2023), perluasan belanja sosial dan bantuan tunai bersyarat yang menysasar kelompok 40% terbawah pendapatan rumah tangga telah terbukti mampu menurunkan ketimpangan secara langsung. Namun, mereka juga mencatat bahwa efektivitas program-program tersebut sangat tergantung pada kualitas pendataan dan ketepatan sasaran.

c. Investasi Publik dalam Sektor Inklusif

Kebijakan fiskal yang diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal, dapat memperbaiki ketimpangan struktural. Menurut Santosa dan Ramadhani (2021), pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dapat membuka akses terhadap ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya menurunkan ketimpangan regional.

Dalam laporan World Bank (2022), disebutkan bahwa Indonesia mengalami ketimpangan spasial yang tinggi, di mana sekitar 80% aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah barat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang memprioritaskan investasi publik di daerah tertinggal sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

d. Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Selain pada aspek alokasi, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran. Penelitian oleh Lestari dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa pemborosan anggaran, praktik korupsi, dan lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dapat melemahkan dampak redistributif kebijakan fiskal. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan fiskal menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan peran fiskal dalam mengurangi ketimpangan.

e. Dampak Pandemi dan Respons Fiskal

Selama pandemi COVID-19, ketimpangan pendapatan sempat meningkat karena banyaknya pekerja informal kehilangan mata pencaharian. Namun, respons fiskal pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menurut Yusuf dan

Firdaus (2021), cukup berhasil menahan lonjakan ketimpangan dengan menyediakan bansos darurat, insentif UMKM, serta stimulus untuk sektor informal.

Respons fiskal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal sangat penting dalam menghadapi guncangan ekonomi dan melindungi kelompok rentan dari kemiskinan yang lebih dalam.

Dari penelitian Sabailake (2024) bahwa asalkan dirancang dan diterapkan dengan benar, Kebijakan fiskal memiliki potensi besar untuk mengurangi perbedaan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju. Pemungutan pajak yang progresif, pengeluaran sosial yang tepat sasaran, penguatan sistem perpajakan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran diperlukan untuk mencapai redistribusi pendapatan yang lebih adil. Namun, kondisi ekonomi, demografi, dan sistem pemerintahan setiap negara sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan fiskal. Akibatnya, negara-negara berkembang harus terus meningkatkan kualitas administrasi fiskal dan memperkuat pemerintahan agar kebijakan fiskal dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, dengan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan, diharapkan kesenjangan ekonomi akan berkurang secara signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan peneliti lain mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu juga dari peneliti sari (2024) hasil penelitian Menunjukkan bahwa kebijakan keuangan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi, kestabilan harga, serta distribusi pendapatan. Kebijakan keuangan yang memperluas, seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah dan memberikan insentif pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara mengurangi inflasi dan mempertahankan kestabilan harga. Penempatan anggaran yang tepat untuk program sosial dan infrastruktur juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan fiskal bergantung pada sinkronisasi dengan kebijakan moneter, serta transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya. Studi ini merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien untuk masa depan, dengan mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Manik et al. (2024), kebijakan fiskal Indonesia memengaruhi permintaan total secara signifikan. Kebijakan ini meningkatkan konsumsi lokal dan investasi. Mereka juga menjaga stabilitas ekonomi saat ada ancaman dari luar. Studi mereka menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal yang tepat dapat berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Instrumen kebijakan seperti pajak progresif, belanja sosial, subsidi, serta program-program pembangunan inklusif memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan redistribusi pendapatan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya kepatuhan wajib pajak, sempitnya basis pajak, dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran belanja sosial. Di sisi lain, keberhasilan program seperti PKH, KIS, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang dan diimplementasikan secara tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan secara nyata.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, penguatan administrasi perpajakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta penguatan kelembagaan agar kebijakan fiskal benar-benar efektif dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penanganan ketimpangan pendapatan juga memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan ekonomi, seperti krisis dan disrupsi global. Dengan demikian, kebijakan fiskal diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, ISSN : 2621-2781.
- Arifin, M. Z. (2021). Perpajakan dan Ketimpangan: Studi Evaluatif atas Sistem Pajak Progresif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 45–59.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Kinerja Kebijakan Fiskal 2022. Jakarta: BKF.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS RI.
- Bappenas. (2024). Proyeksi Gini Ratio dan Strategi Penurunan Ketimpangan dalam RKP dan RPJMN 2025. Jakarta: Bappenas RI.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan antara penerimaan pajak penghasilan dan pbb terhadap kesenjangan pendapatan. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(1)
- Hardinandar, F. (2020). Peran kebijakan fiskal terhadap trade-off antara ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal INOVASI*, 16(1), 1-10.
- Heliany, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Stiarni* (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Dashboard Bansos (SiPDBS). Jakarta: Kemensos RI.
- Khoirudin, R., & Khasanah, U. (2018). Valuasi Ekonomi Objek Wisata Pantai Parangtritis, Bantul Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(2), 152–166.
- Krippendorff, K. (2022). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lestari, H., & Handayani, D. (2020). Transparansi Anggaran dan Efektivitas Kebijakan Fiskal di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 67–83.
- Manik, C. W., Silaban, K., Mnurung, M. P., Situmorang, R. M., Sinambela, R. A., & Silaban, P. S. M. J. (2024). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 137-146.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986-2997.

- Nugroho, B., & Prasetyo, R. (2022). Pajak dan Ketimpangan di Indonesia: Efektivitas Pajak dalam Redistribusi Pendapatan. *Jurnal Fiskal Indonesia*, 7(2), 76–90.
- Nusiantari, D. & Swasito, A. (2020), Peran penerimaan pajak dalam usaha pemerataan pendapatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1)
- Santosa, M. D., & Ramadhani, D. (2021). Pembangunan Infrastruktur dan Ketimpangan Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Wilayah dan Pembangunan*, 11(4), 99–112.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1-10.
- Sugiarti, I., & Erdkhadifa, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2427-2441.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suripto, S. (2025). Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).14.
- Wahyuni, A. S. (2022). Pendekatan Berdiferensiasi Dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 12(2), 118–126.
- Wibowo, A., & Yuliana, S. (2023). Evaluasi Program Perlindungan Sosial Terhadap Penurunan Rasio Gini di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18(1), 21–38.
- Widiarti, F. & Subekti, K. (2022). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan model penerimaan teknologi (tam) sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting)*
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Recovery and Reform*. World Bank Group Report.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Seizing New Opportunities*. Jakarta: World Bank Indonesia.
- Yusuf, A. A., & Firdaus, M. (2021). Respons Fiskal terhadap Pandemi: Implikasi terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 120–138.
- Zai, S., & Sabailaket, A. S. (2024). Analisis Peran Kebijakan Fisikal Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 8